

## OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAN BPJS KESEHATAN DALAM PENANGANAN *STUNTING* DI KABUPATEN MERAUKE

<sup>1</sup>Muhammad Novan Prasetya

<sup>2</sup>Syahrudin

<sup>3</sup>Umiyati Haris

<sup>4</sup>Aenal Fuad Adam

<sup>1234</sup>Universitas Musamus Merauke

<sup>1</sup>[muhnovanprasetya@gmail.com](mailto:muhnovanprasetya@gmail.com), <sup>2</sup>[syahrudin@gmail.com](mailto:syahrudin@gmail.com),

<sup>3</sup>[umiyatiharis@gmail.com](mailto:umiyatiharis@gmail.com), <sup>4</sup>[aenalfuadadam@gmail.com](mailto:aenalfuadadam@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Stunting is a troubling social problem in Merauke Regency, South Papua, the Head of Merauke Regency Health Office stated that the number of stunting has increased from 2021 to 2022, through the Electronic Application for Community-Based Nutrition Recording and Reporting (E-ppgbm), as of August 2022 reported by all health centers in Merauke Regency, there were 2,015 stunting toddlers. The purpose of this research is to analyze the problem of stunting and find steps to handle and prevent stunting in Merauke. This research method uses descriptive qualitative. From the above problems, to overcome stunting in Merauke, there are three ways taken by the Merauke government. First, BPJS provides access to quality health services for children who are vulnerable to stunting. Second, There is a Merauke government policy to formulate stunting handling and increase public awareness about balanced nutrition and healthy lifestyles. Third, Optimizing the role of BPJS Health and the government can contribute to achieving the welfare of the 2045 golden generation in Merauke Regency.*

**Keywords:** *Merauke Local Government; BPJS; Stunting; Golden Generation 2045*

### **ABSTRAK**

Stunting merupakan masalah sosial yang merisaukan di Kabupaten Merauke Papua Selatan, Kadis Kesehatan Kabupaten Merauke menyatakan jumlah stunting mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022, melalui aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-ppgbm), per Agustus 2022 yang dilaporkan oleh seluruh puskesmas di Kabupaten Merauke, tercatat 2.015 balita stunting. Tujuan penelitian ini menganalisis permasalahan stunting dan menemukan Langkah-langkah penanganan dan pencegahan stunting di Merauke. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dari permasalahan di atas, untuk mengatasi stunting di Merauke, ada tiga cara yang ditempuh pemerintah Merauke. *Pertama*, BPJS memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi anak-anak yang rentan terhadap stunting. *Kedua*, Adanya kebijakan pemerintah Merauke untuk merumuskan penanganan stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang dan pola hidup sehat. *Ketiga*, Optimalisasi peran BPJS Kesehatan dan pemerintah dapat berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan generasi emas 2045 di Kabupaten Merauke.

**Keyword:** *Pemda Merauke; BPJS; Stunting; Generasi Emas 2045*

## PENDAHULUAN

Stunting merujuk pada keadaan terhambatnya pertumbuhan pada anak di bawah usia 5 tahun akibat kekurangan gizi yang kronis, menyebabkan mereka memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak seumur mereka (Alifariki, 2020). Jika situasi ini terus berlanjut, diperkirakan sekitar 162.000.000 anak balita di seluruh dunia akan terpengaruh. Pada tahun 2025, diperkirakan 127 juta anak balita di seluruh dunia akan menghadapi masalah perkembangan, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berencana untuk mengurangi jumlah anak dengan pertumbuhan terhambat menjadi kurang dari 100 juta pada tahun tersebut (Nurul Khairani, 2022).

Anak-anak balita di Indonesia yang mengalami gizi buruk diklasifikasikan berdasarkan Indeks Tinggi Badan (TB/U) yang mencakup kategori sangat pendek dan pendek. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, persentase stunting sebesar 24,4%, sedangkan pada tahun 2022 persentasenya turun menjadi 21,6%. Grafik proporsi anak balita yang pendek dan sangat pendek (TB/U) di Jawa Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sebesar 24,5%, yang merupakan angka tertinggi di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 2022, prevalensi stunting pada anak-anak di bawah 5 tahun di Jawa Barat turun menjadi 20,2%, namun masih terdapat banyak anak balita yang mengalami stunting, terutama di Kabupaten Sumedang (Kesehatan, 2022).

Provinsi Papua memiliki tingkat stunting dan kemiskinan ekstrem yang relatif tinggi. Meskipun demikian, terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki angka prevalensi stunting yang rendah (Fauzia, 2023). "(Provinsi Papua) Angka stunting dan kemiskinan ekstremnya masih relatif tinggi, kecuali ada beberapa yang cukup tapi tetap cukup menggembirakan karena ada yang misalnya stunting untuk Jayapura sudah 20,2%, kemudian untuk untuk kota Jayapura 20,6% stuntingnya, kemudian Keerom 25,9%, Sarmi 25,6%, kemudian Mamberamo Raya 29%, Waropen 22,2%," terang Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP dalam paparannya pada acara Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Papua secara daring melalui zoom meeting Selasa siang (14/03/2023).

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP menjelaskan beberapa data sebagai berikut: Untuk Jayapura, tingkat stunting mencapai 20,2%, sedangkan untuk kota Jayapura mencapai 20,6%. Di Kabupaten Keerom, angka stunting mencapai 25,9%, sementara di Sarmi mencapai 25,6%. Di Kabupaten Mamberamo Raya, tingkat stunting mencapai 29%, sedangkan di Waropen mencapai 22,2%. Untuk Provinsi Papua Tengah, Intan Jaya memiliki tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 4,57% dan tingkat stunting sebesar 35,4%. Puncak Jaya memiliki tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 28,37% dan tingkat stunting sebesar 42,5%. Tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 14,94% dan tingkat stunting mencapai 42% di Kabupaten Puncak. Tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 9,62%. Di Deiyai, sedangkan tingkat stuntingnya relatif rendah yaitu 13,4%, di bawah rata-rata nasional. Di Mimika, tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 8,68%, sementara tingkat stunting masih sebesar 33%. Pada Kabupaten Paniai, tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 1,83%, mendekati rata-rata nasional, sedangkan tingkat stunting masih tinggi yaitu 45,2%. Di Dogiyai, tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 10,88%, sedangkan tingkat stunting mencapai 35,1% (Fauzia, 2023).

Tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 14,6%, dan tingkat stunting mencapai 17,1% di Deiyai." Pada Papua Selatan, Boven Digoel memiliki tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 9,23%, sedangkan tingkat stunting mencapai 37,2%. Merauke memiliki tingkat kemiskinan ekstrim yang cukup rendah, yaitu 2,71%, sedangkan tingkat stunting

masih tinggi, yaitu 23,7%. Kabupaten Mappi memiliki tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 2,46%, sementara tingkat stunting mencapai 29,6%. Di Asmat, tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 4,81%, dan tingkat stunting mencapai 54,5% (Fauzia, 2023).

Berdasar data diatas, stunting merupakan masalah serius dalam kesehatan anak yang terjadi akibat gizi buruk dan kurangnya perawatan kesehatan yang memadai. Stunting dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak, serta berpotensi menghambat potensi mereka dalam mencapai kesejahteraan di masa depan. Kabupaten Merauke, yang terletak di Indonesia, juga menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah stunting di wilayahnya. Dalam rangka mengatasi masalah stunting, peran BPJS Kesehatan dan pemerintah sangatlah penting.

BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas jaminan kesehatan di Indonesia, sementara pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan program kesehatan yang efektif. Dalam konteks Kabupaten Merauke, peran aktif BPJS Kesehatan dan pemerintah diperlukan untuk memastikan penanganan stunting yang efektif dan menyeluruh.

## TINJAUAN PUSTAKA

Stunting adalah kondisi kegagalan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Secara fisik, anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan normal sesuai usianya, ditandai dengan postur tubuh yang lebih pendek dibandingkan teman sebaya karena mengalami gangguan pertumbuhan (WHO). Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting merupakan permasalahan kurang gizi kronis yang termanifestasi dalam bentuk tubuh yang pendek. Anak yang menderita stunting umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, dan produktivitas yang rendah. Tingginya prevalensi stunting dalam jangka panjang

akan berdampak negatif pada kerugian ekonomi bagi Indonesia. (Aryastami, 2017).

WHO menyatakan bahwa masalah kesehatan masyarakat dianggap kronis jika prevalensi stunting melebihi 20%. Oleh karena itu, secara nasional, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara dengan masalah stunting yang bersifat kronis. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi dalam beban stunting pada anak di kawasan Asia Tenggara. Di tingkat global, Indonesia menempati peringkat kelima setelah Pakistan (peringkat ke-4), Nigeria (peringkat ke-3), China (peringkat ke-2), dan India (peringkat ke-1) (Izwardy, 2019).

Faktor penyebab stunting bersifat multidimensional dan tidak hanya terkait dengan masalah gizi buruk pada ibu hamil dan anak balita. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan stunting meliputi:

1. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan anak.
2. Pola asuh yang tidak tepat.
3. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membeli atau menyediakan bahan makanan yang cukup.
4. Pola konsumsi yang tidak sehat.
5. Tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
6. Sanitasi yang tidak memadai.
7. Kurangnya asupan gizi yang cukup.
8. Lingkungan yang tidak bersih.
9. Distribusi yang belum optimal dari BPJS Kesehatan.

Semua faktor ini dapat berkontribusi terhadap terjadinya stunting pada anak, permasalahan tersebut menunjukkan kompleksitas yang melibatkan aspek-aspek beragam (Sri Mugianti, 2018).

Kasus stunting seringkali terjadi pada keluarga yang menikah di usia muda. Ketidakmampuan secara fisik dan mental pada ibu hamil yang masih muda menghadirkan berbagai tantangan selama proses kehamilan hingga persalinan. Kondisi stunting dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan anak, baik

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak stunting dapat memengaruhi anak mulai dari masa kecil hingga dewasa.

Dalam jangka pendek, stunting dapat mengganggu perkembangan otak, termasuk perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak yang tidak optimal. Selain itu, anak yang mengalami stunting cenderung memiliki metabolisme tubuh yang rentan terhadap penyakit, dan mereka mungkin mengalami masalah pertumbuhan fisik. Dengan demikian, stunting tidak hanya berdampak pada masa kanak-kanak, tetapi juga membawa konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan anak.

Dalam tulisan ini, teori yang relevan digunakan untuk mendukung analisis mengenai peran pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Merauke adalah Teori Sistem Kesehatan, Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis penanganan oleh dua *stakeholder* tersebut *stunting* sebagai bagian dari sistem kesehatan yang lebih luas. Teori ini memungkinkan pemahaman tentang interaksi antara berbagai elemen dalam sistem kesehatan, termasuk aspek kelembagaan, kebijakan, pembiayaan, dan pelayanan kesehatan (Kurniawidjaja, 2012).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah menggambarkan permasalahan stunting di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, serta menganalisis kebijakan dan peran pemerintah daerah beserta BPJS dalam mengatasi stunting. Metode penelitian kualitatif dianggap lebih obyektif karena menggunakan pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan informasi, melibatkan individu dalam wawancara.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer, yang mencakup wawancara langsung di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data secara langsung

dari responden terkait yaitu dinas kesehatan kabupaten Merauke, bidan di beberapa kecamatan di Merauke, dan petugas BPJS kabupaten Merauke. Selain itu, data sekunder juga digunakan, data informasi yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi sebagai data awal dalam penelitian. Sumber data mencakup Dinas Kesehatan serta situs WHO dan UNICEF, memberikan kerangka informasi yang luas untuk mendalami masalah yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Fenomena Stunting di Indonesia

Stunting merupakan kondisi kegagalan pertumbuhan pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis, menyebabkan anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi ini dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada periode awal setelah kelahiran, namun gejala stunting baru terlihat saat anak mencapai usia 2 tahun. Di Indonesia, sekitar 37% atau hampir 9 juta anak balita mengalami stunting, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar. Anak-anak balita yang mengalami stunting, khususnya bayi di bawah dua tahun, berisiko mengalami penurunan tingkat kecerdasan, menjadi lebih rentan terhadap penyakit, dan berpotensi mengalami penurunan produktivitas di masa depan (Sulistiyowati & Hermawan, 2022).

Secara umum, stunting dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tingkat kemiskinan, dan memperlebar ketidaksetaraan sosial. Data Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 tercatat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki angka stunting tertinggi di Indonesia, sementara Bali memiliki tingkat stunting terendah (Editor, 2018). Bahkan Jakarta, sebagai ibu kota negara, tidak luput dari masalah stunting, dengan 22,7% dari total penduduknya mengalami kondisi tersebut.

## **Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Stunting melalui Sinergi Kementerian dan Lembaga**

Pemerintah Indonesia telah aktif berupaya mengatasi permasalahan stunting dengan melakukan koordinasi dan sinergi antara beberapa kementerian yang turut berkontribusi dalam mengurangi kasus stunting di Indonesia. Program Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor, sesuai dengan PMK No. 61/PMK.07/2019, mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Presiden di tingkat nasional, Bappenas di tingkat kabupaten-kota, dan Kemendesa PDTT di tingkat desa (DJPK, 2016). Sebanyak 23 Kementerian/Lembaga (K/L) terlibat dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Indonesia, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PPN/Bappenas, TNP2K, Kementerian Perindustrian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Negara, Koperasi, dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Riset Nasional/Kemenristekdikti, Kemendesa, BPOM, dan lainnya.

Sebagai garda terdepan, Kementerian Kesehatan RI telah menjalankan berbagai intervensi untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia. Langkah-langkah tersebut mencakup suplementasi gizi makro dan mikro (TTD, Vitamin A, taburia), pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, fortifikasi, kampanye gizi seimbang, kelas ibu hamil, pemberian obat cacing, penanganan kekurangan gizi, dan jaminan kesehatan nasional (JKN). Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan K/L terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih, serta Kementerian Desa dan PDTT dalam pembangunan desa. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya kesadaran publik terhadap isu stunting dan mendorong sinergitas antarlembaga pemerintah pusat dan daerah (PPN/Bappenas, 2018).

Pendekatan holistik dan terintegrasi diterapkan oleh Kementerian Kesehatan, di mana berbagai program melibatkan kerjasama dengan sektor-sektor terkait. Misalnya, dalam program fortifikasi, Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk distribusi bahan makanan tambahan (PPN/Bappenas, 2018). Untuk pengawasan keamanan pangan, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan BPOM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Kegiatan ini melibatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan, penegakan hukum terkait label, dan iklan pangan.

Pembiayaan untuk pencegahan stunting berasal dari berbagai sumber, termasuk Kementerian Keuangan, dana desa (APBDesa), dana kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), dana alokasi khusus (DAK), dana provinsi (APBD provinsi), dana kementerian/lembaga (APBN), serta dana dari korporasi dan CSO. Adanya keterlibatan pihak asing juga terjadi melalui bantuan luar negeri dalam bentuk hibah dan bantuan teknis. CSO, bersama dengan INFID, turut serta dalam advokasi terkait SDGs dan mendukung mainstreaming SDGs dalam RPJMN (Sari et al., 2022).

## **Peran Pemerintah dalam Upaya Penanganan Stunting: Mewujudkan Kesejahteraan Anak-Anak**

Pemerintah memegang peran strategis dalam mendukung penanganan stunting melalui formulasi kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Kebijakan gizi, kebijakan kesehatan anak, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi landasan bagi kesejahteraan anak. Fokus kebijakan mencakup aspek gizi, pendidikan kesehatan, akses pelayanan kesehatan, dan upaya pencegahan stunting, menciptakan kerangka kerja yang holistik (Ridua et al., 2020). Langkah konkrit pemerintah terlihat dalam rancangan dan pelaksanaan program intervensi.

Melibatkan pemberian makanan bergizi, suplementasi vitamin dan mineral, pendidikan gizi, imunisasi, dan perawatan kesehatan anak, program-program ini diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan eksisting, seperti puskesmas dan posyandu.

Koordinasi antarinstansi menjadi inti dari peran pemerintah. Dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan perlu berkoordinasi dengan baik untuk menyediakan layanan yang terintegrasi, mendukung pertukaran informasi, dan mewujudkan kolaborasi efektif dalam penanganan stunting. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui kampanye edukasi, seminar, pelatihan, dan pendekatan komunikasi yang efektif, upaya ini mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya gizi seimbang, pola makan yang baik, dan perawatan kesehatan yang efektif dalam pencegahan stunting.

Dengan peran proaktif pemerintah, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, implementasi program yang efektif, serta koordinasi yang baik antarinstansi. Kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mencapai penurunan signifikan angka stunting di Kabupaten Merauke.

1. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung penanganan stunting. Hal ini meliputi kebijakan gizi, kebijakan kesehatan anak, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada kesejahteraan anak. Kebijakan ini mencakup aspek gizi, pendidikan kesehatan, akses pelayanan kesehatan, dan upaya pencegahan stunting.
2. Pemerintah dapat merancang dan melaksanakan program-program intervensi yang ditujukan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Program-program ini meliputi pemberian makanan bergizi, suplementasi vitamin dan mineral, pendidikan gizi, imunisasi, dan perawatan kesehatan anak. Pemerintah juga dapat

mengintegrasikan program-program ini ke dalam layanan kesehatan yang ada, seperti puskesmas dan posyandu.

3. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai instansi terkait, termasuk dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan. Koordinasi yang baik antara instansi-instansi ini memungkinkan penyediaan pelayanan yang terintegrasi, pertukaran informasi, dan kolaborasi dalam upaya penanganan stunting.
4. Pemerintah perlu melakukan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pola makan yang baik, dan perawatan kesehatan yang tepat guna mencegah stunting. Ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, seminar, pelatihan, dan pendekatan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Melalui peran aktif pemerintah dalam penanganan stunting, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, implementasi program yang efektif, serta koordinasi yang baik antarinstansi. Kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mencapai penurunan angka stunting yang signifikan di Kabupaten Merauke.

### **Peran BPJS Kesehatan dalam Penanganan Stunting: Meningkatkan Akses dan Efektivitas Layanan Kesehatan Anak-Anak.**

*Stunting*, sebagai permasalahan kesehatan masyarakat, menuntut keterlibatan aktif BPJS Kesehatan dalam menyediakan jaminan kesehatan yang komprehensif. Melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, BPJS Kesehatan memberikan akses yang vital bagi layanan kesehatan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan stunting pada anak-anak. Kerjasama erat dengan berbagai fasilitas pelayanan

kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan klinik, menjadi landasan utama dalam memberikan layanan gizi, perawatan anak, dan intervensi medis yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal (Azahra et al., 2023).

Program-program kesehatan spesifik yang dimiliki BPJS Kesehatan, seperti program gizi anak dan imunisasi, menjadi instrumen penting dalam penanganan stunting. Dengan fokus pada pemberian makanan bergizi, suplementasi vitamin dan mineral, serta vaksinasi, BPJS Kesehatan berperan langsung dalam mendukung pertumbuhan anak-anak secara optimal. Selain itu, peran BPJS Kesehatan tidak terbatas pada aspek layanan medis, melainkan juga melibatkan upaya penyuluhan dan pendidikan kesehatan. Melalui kegiatan kampanye, seminar, dan edukasi, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pola makan yang baik, dan perawatan kesehatan yang tepat dalam konteks penanganan stunting.

Pemantauan dan evaluasi menjadi fokus BPJS Kesehatan dalam memastikan pelaksanaan program penanganan stunting berjalan efektif. Dengan memantau ketersediaan dan mutu layanan kesehatan, mengevaluasi efektivitas program, serta mengumpulkan data yang relevan, BPJS Kesehatan berperan sebagai pemangku kepentingan kunci dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dengan mengoptimalkan peran BPJS Kesehatan dalam penanganan stunting, diharapkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas meningkat, intervensi diberikan secara tepat waktu, dan upaya pencegahan stunting menjadi lebih efektif. Kolaborasi yang sinergis antara BPJS Kesehatan, pemerintah, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai penurunan signifikan angka stunting di Kabupaten Merauke.

Dengan peran yang dimainkan oleh BPJS Kesehatan dalam penanganan stunting, diharapkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas meningkat, intervensi

diberikan secara tepat waktu, dan upaya pencegahan stunting menjadi lebih efektif. Kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan peran BPJS Kesehatan dapat dioptimalkan dalam upaya mencapai penurunan angka stunting yang signifikan di Kabupaten Merauke.

### **Upaya Optimalisasi Peran BPJS Kesehatan dan Pemerintah**

Dalam upaya meningkatkan penanganan *stunting* di Kabupaten Merauke, pemerintah dan BPJS Kesehatan bekerjasama untuk memperkuat kolaborasi dan integrasi kebijakan. Langkah-langkah konkret yang diambil termasuk:

1. Pembentukan forum rutin antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan instansi terkait guna mendukung pertukaran informasi, pengalaman, serta evaluasi program.
2. Pengintegrasian kebijakan dan program penanganan stunting ke dalam rencana strategis BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah, dengan fokus pada sinergi dan keterkaitan program-program tersebut.
3. Penyelenggaraan pertemuan rutin antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah, di mana strategi, kendala, dan upaya bersama dalam penanganan stunting dapat didiskusikan.
4. Peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan di wilayah terpencil dengan ekspansi jaringan fasilitas kesehatan dan peningkatan transportasi medis.
5. Memastikan ketersediaan tenaga medis dan paramedis berkualitas, khususnya yang kompeten dalam penanganan gizi dan perawatan anak.
6. Pelatihan dan pendidikan kontinu bagi tenaga medis dan paramedis mengenai penanganan stunting, pemantauan pertumbuhan anak, dan strategi pencegahan.

7. Kampanye informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pola makan yang baik, dan perawatan kesehatan yang tepat untuk mencegah stunting.
8. Penggunaan berbagai media komunikasi, termasuk media sosial, brosur, video pendek, dan ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang stunting.
9. Keterlibatan tokoh masyarakat, guru, dan komunitas lokal dalam menyampaikan pesan-pesan tentang stunting untuk memastikan pemahaman dan penerimaan yang maksimal.
10. Evaluasi dan perbaikan kebijakan, termasuk dalam hal pendanaan, regulasi, dan manajemen program penanganan stunting.
11. Integrasi pendekatan multisektoral dalam kebijakan penanganan stunting, seperti pendidikan, pertanian, dan pemberdayaan perempuan, untuk mendukung upaya pencegahan secara holistik.

Dengan strategi ini, diharapkan peran optimal BPJS Kesehatan dan pemerintah, bersama dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran masyarakat, dan perbaikan kebijakan, dapat mewujudkan penanganan stunting yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Merauke.

### **Optimalisasi peran BPJS Kesehatan dan pemerintah di Kabupaten Merauke**

Memberikan dampak positif yang signifikan pada akses layanan kesehatan anak-anak serta mengurangi angka stunting. Masyarakat mendapatkan manfaat lebih baik dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Peran aktif BPJS Kesehatan dan pemerintah memungkinkan intervensi gizi yang tepat dan perawatan kesehatan yang efektif, yang dapat mengurangi angka stunting dan memastikan pertumbuhan yang sehat. Melalui kampanye dan edukasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan pemerintah, kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi

seimbang, pola makan yang baik, dan perawatan kesehatan meningkat. Hal ini membantu masyarakat memahami dampak buruk stunting dan mendorong pencegahan serta penanganannya. Optimalisasi peran ini juga memperkuat kolaborasi antarinstansi, menciptakan kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan, pemerintah, fasilitas kesehatan, dan komunitas lokal dalam penanganan stunting.

Peran aktif BPJS Kesehatan dan pemerintah tidak hanya memberikan dukungan kepada fasilitas kesehatan, tetapi juga meningkatkan kapasitas dalam penanganan stunting. Tenaga medis dan paramedis dilatih dengan pengetahuan mendalam tentang penanganan gizi dan perawatan anak, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada anak-anak. Optimalisasi peran ini juga menghasilkan pengumpulan data dan informasi yang lebih baik tentang stunting dan penanganannya. Data yang diperoleh membantu pemantauan program, evaluasi intervensi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan manfaat dan dampak ini, diharapkan Kabupaten Merauke dapat mencapai penurunan signifikan angka stunting, meningkatkan kesejahteraan anak-anak, dan membentuk generasi emas yang sehat dan berkualitas di masa depan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis terhadap peran pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Merauke, beberapa kesimpulan dapat diambil:

1. BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi anak-anak yang rentan terhadap stunting.
2. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penanganan stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang dan pola hidup sehat.
3. Optimalisasi peran BPJS Kesehatan dan pemerintah dapat berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan generasi emas

2045 di Kabupaten Merauke dengan mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan peran BPJS Kesehatan dan pemerintah dalam penanganan stunting di Kabupaten Merauke:

1. BPJS Kesehatan perlu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama untuk balita dan anak-anak yang berisiko stunting.
2. Pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mendukung penanganan stunting, termasuk pengembangan program gizi, edukasi kesehatan, dan peningkatan kolaborasi antarinstansi terkait.
3. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah, dan masyarakat dalam implementasi program penanganan stunting.
4. Diperlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap keberhasilan program penanganan stunting serta pembuatan laporan berkala untuk mengukur dampak dan efektivitas kebijakan yang telah dilakukan. Masyarakat perlu diberdayakan melalui edukasi dan informasi yang komprehensif tentang pentingnya gizi seimbang, pola hidup sehat, dan pentingnya memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan penanganan stunting di Kabupaten Merauke dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga mewujudkan kesejahteraan generasi emas pada tahun 2045.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifariki, L. O. (2020). *Gizi Anak dan Stunting* (Heriviyatno (ed.); 1st ed.). Leutika Pro.  
<https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=e9kZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Stunting+merujuk+pada+keadaan+terhambatnya+pertumbuhan+pada+anak+di+bawah+usia+5+tahun+akibat+kekurangan+gizi+yang+kronis,+menyebabkan+mereka+memiliki+ukuran+yang+lebih+kecil+diba>
- Aryastami. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4).  
<https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7456.233-240>
- Azahra, I. T., Ningrum, D., & Dolifah, D. (2023). *PEMANFAATAN BPJS KESEHATAN PADA IBU*. 7(40), 916–925.
- DJPK. (2016). *Dana Alokasi Khusus*. 3.  
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAK.pdf>
- Editor. (2018). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*.  
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- Fauzia, R. (2023). *Tempati Urutan Ketiga Tertinggi Stunting Se-Indonesia, Ini Langkah-Langkah Konkrit Provinsi Papua Percepat Penurunan Stunting dan Menghapus Kemiskinan Ekstrim*. BKKBN.  
<https://www.bkkbn.go.id/berita-tempati-urutan-ketiga-tertinggi-stunting-se-indonesia-ini-langkah-langkah-konkrit-provinsi-papua-percepat-penurunan-stunting-dan-menghapus-kemiskinan-ekstrim>
- Izwardy, D. (2019). The Strategy and Policy to Involve Property in Indonesia. *Germas*, 2(2), 41–52.
- Kesehatan, S. (2022). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan*, 1–60.
- Kurniawidjaja, M. (2012). *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja* (3rd ed.). UI Publisher.  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=H3pREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=teori+sistem+kesehatan&ots=BLQdJUzyof&sig=WHhWb4egVOewRml\\_41QsJhvb3ro&redir\\_esc=y#v=onepage&q=teori+sistem+kesehatan&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=H3pREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=teori+sistem+kesehatan&ots=BLQdJUzyof&sig=WHhWb4egVOewRml_41QsJhvb3ro&redir_esc=y#v=onepage&q=teori+sistem+kesehatan&f=false)
- Nurul Khairani, S. U. E. (2022). Karakteristik balita, ASI eksklusif, dan keberadaan perokok dengan kejadian stunting pada balita. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 7(1), 70–81.  
<https://doi.org/10.30867/action.v7i1.423>
- PPN/Bappenas, K. (2018). *Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018*.
- Ridua, I. R., Miagina, G., Djurubassa, P., Studi, P., Pemerintahan, I., Halmahera, U., Utara, H., Utara, M., Studi, P., Pemerintahan, I., Halmahera, U., Utara, H., & Utara, M. (2020). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting*. 2(2), 135–151.
- Sari, D. A., Margules, C., Lim, H. S., Sayer, J. A., Boedhihartono, A. K., Macgregor, C. J., Dale, A. P., & Poon, E. (2022). Performance Auditing to Assess the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19).  
<https://doi.org/10.3390/su141912772>
- Sri Mugianti, D. (2018). Faktor Penyebab Anak Stunting. *Jurnal Ners Dan Kebidanan*, 5(1), 268–278.  
<https://doi.org/10.26699/jnk.v5i3.ART.p268>
- Sulistiyowati, D., & Hermawan, H. (2022). *Meta analisis : Pencegahan Stunting di Desa Gumelar*. 1(1), 42–47.